

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PAUD NONFORMAL

Nunu Heryanto¹

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari “empowerment” yang bermakna sebagai upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki individu serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu: pertama, pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya proses dialog

Pemberdayaan masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lebih difokuskan kepada implementasi kebijakan strategi dasar pendidikan nasional, yaitu pertama, strategi yang mengarah kepada pemerataan pendidikan. Strategi ini biasa dilakukan melalui cara dan pendekatan untuk : (a) menyempurnaan dan pembaharuan kurikulum, (b) Peningkatan mutu tutor dan pengelola, (c) menata ulang system pembelajaran, (d) meningkatkan manajemen kelembagaan, (e) meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan tutor, (f) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, (g) menata-ulang system monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini memasuki era globalisasi yang disertai dengan pertumbuhan teknologi canggih sehingga informasi antar dunia bisa dengan cepat dapat diakses atau sebaliknya bisa mengirim kepada pihak lain dengan memanfaatkan dunia maya, oleh sebab itu dunia seolah-olah seperti tanpa sekat (*borderless*), kenyataan ini hendaknya dapat menyikapi dengan arif terhadap informasi luar mana yang cocok dan mana yang perlu disaring dengan filter falsafah dan nilai-nilai moral bangsa. Lebih dari pada itu adalah bahwa kita adalah harus menghadapi globalisasi secara bersama dan bersatu dengan semangat solidaritas. Dalam konteks ini paling tidak terdapat dua arah yang satu sama lain saling terkait, pertama kita memiliki arah untuk memasuki era global dengan memperbesar kekuatan dan meningkatkan kemampuan, kedua, bagi mereka yang lemah dan masih tertinggal harus diperbesar keberdayaannya. Dengan cara demikian diharapkan tumbuh/timbul keterkaitan struktural-fungsional strategis untuk upaya progresif dalam memasuki arah global, dan upaya menjamin kelangsungan hidup masyarakat terutama lapisan masyarakat lemah.

Issue global cenderung lebih mengarah pada masalah pertumbuhan ekonomi (*economical growth*) disamping faktor lain seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, namun satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah demokratisasi dan hak azasi manusia (*human right*), proses demokratisasi terdapat tiga tahapan yaitu :

(1) Tahap inisial, yaitu dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat

- (2) Tahap partisipatoris, yaitu dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat
- (3) Tahap emansipatif, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat (Onny S. Priyono, 1996)

Menurut kajian para ahli bahwa Indonesia telah memasuki pada tahap kedua (tahap partisipatoris), dan untuk upaya akselerasi pada tahap ketiga maka kecuali faktor ekonomi mejadi faktor dominan, disamping faktor-faktor yang lainnya menjadi sangat penting. Dalam upaya percepatan tersebut dan berbarengan pula dengan upaya pelaksanaan pembangunan manusia berkesinambungan, kita tidak cukup hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat harus mejadi fokus perhatian kita bersama.

Tulisan ini mengkaji masalah pemerdayaan masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini dipandang perlu sebagai pemberian wawasan dan keterampilan sosial praktis terutama bagi tenaga pendidik PAUD dalam memberdayakan masyarakat disamping menunaikan tugas pokoknya sebagai fasilitator pembelajaran.

B. Latar Belakang dan Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari “*empowerment*” yang merupakan hasil pemikiran dan telaah pikiran manusia dan kebudayaan barat (Eropa) mulai muncul siktar dekade 70an dan dipermasalahkan dan berkembang terus pada dekade 80an, dan dekade 90an samapai pada akhir abad ke 20. Pemberdayaan muncul sebagai tema yang penting terutama dalam gerakan demokratisasi, partisipatoris, emansipatif termasuk gerakan wanita dan gerakan-gerakan kaum tertindas lainnya dalam pengorganisasian masyarakat dan pertumbuhan dari *new -populism* dan dalam gerakan-gerakan progresif untuk perdamaian dan keadilan sosial (Kresberg, 1992)

Pemaknaan pemberdayaan sangat penting artinya, karena fakta menunjukkan bahwa pembangunan dengan *perspektif patriachal* berakibat pada sekelompok masyarakat menjadi tidak berdaya, seperti kaum petani dan kelompok komunitas lainnya yang senasib yang cenderung tingkat pendidikannya lebih rendah, hidup dalam kondisi keterbelakangan, miskin, tidak berdaya, dan ketergantungan pada pihak lain. Agar terjadi pembangunan yang seimbang (*equal*), diperlukan usaha pemberdayaan agar mereka mempunyai akses dalm control (*access to and control over*) terhadap sumber-sumber yang bernilai dalam semua aspek pembangunan (Richard dan Kreisberg, 1992).

Pembangunan dalam pelaksanaannya selalu mengupayakan terjadinya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, kelompok atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Pranarka, 1996). Dalam proses pemberdayaan terdapat dua pihak yang saling terkait., yakni unsur luar berupa lembaga maupun individu yang memberi kekuatan (*power to powerless*) dan pihak yang mengalami proses pemberdayaan (*empowerment to powerless*) sehingga punya kekuatan untuk dapat mengambil peran bagi lingkungannya.

Pendapat lain menyatakan bahwa inti pemberdayaan adalah upaya untuk mengubah keadaan individu atau kelompok agar menjadi lebih berdaya. Menurut Kartasasmita (1996), Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah pemunculan daya atau penguatan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan, dan dalam pelaksanaannya peranan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini mungkin dicapai dengan menguatkan kapasitas mereka melalui pemberian kesempatan, keahlian dan pengetahuan sehingga mereka mampu untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Atau dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (*Kartasamita, 1996: 145*).

C. Proses Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan hal yang dilakukan seorang pelaku perubahan terhadap target perubahan baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas adalah upaya mengembangkan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sehingga target perubahan tersebut mempunyai kekuatan dalam penentuan keputusan dan tindakan atas hidup mereka dengan meningkatnya kapasitas dirinya. Proses tersebut bisa terjadi dengan menggunakan atau melalui transfer daya dari lingkungan ke target perubahan. (Dayal, 1997)

Proses pemberdayaan sendiri mengandung dua kecenderungan (Hikmat, 2001). Pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kecenderungan proses yang pertama ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya proses dialog. Diantara kedua proses pemberdayaan tersebut saling terkait. Artinya agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 dalam Hikmat, 2001)

Menurut Kartasasmita, 1996, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertamanya dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Lebih lanjut Kartasasmita menerangkan bahwa proses pemberdayaan merupakan: “upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga didalam pemberdayaan mengandung dua pihak yang perlu ditinjau dengan seksama yaitu pihak yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan. Agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan diperlukan komitmen yang tinggi dari kedua pihak. Dari pihak pemberdaya harus beranjak dari pendekatan bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai program dan *program* pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Untuk itu, maka dalam pemberdayaan masyarakat, harus mengikuti pendekatan yang terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok”.

Hal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan adalah nuansa yang humanis. Dalam arti pemberdayaan tidak hanya dimaksudkan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai sosial budaya setempat. Dengan kata lain proses pemberdayaan tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomis tetapi juga nilai tambah sosial budaya (Hikmat, 2001)

Batten (Adi,2003) menawarkan gagasan bahwa dalam melakukan proses pemberdayaan para petugas perubahan (*change agen*) dapat melakukan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Direktif

Pendekatan direktif atau pendekatan instruktif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan asumsi bahwa petugas tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan *change agent* bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *change agent*. *Change agent*-lah yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya, dan selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan *change agent*

Dengan pendekatan ini banyak hasil yang diperoleh, tetapi hasil yang diperoleh lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan seringkali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan ini menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Hal ini antara lain disebabkan akan perlunya perubahan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*) dan niat (*intention*) individu sebelum terjadinya perubahan perilaku (*over behaviour*), bila agen perubahan (*change agent*) menginginkan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang bersifat temporer.

Penggunaan pendekatan ini juga mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan masyarakat, sedangkan bagi masyarakat, segi yang buruk adalah dapat munculnya ketergantungan terhadap kehadiran orang luar sebagai agen perubahan, karena pendekatan direktif seringkali juga disebut sebagai pendekatan yang bersifat instruktif (Adi, 2003)

2. Pendekatan Non-direktif

Pendekatan non-direktif atau partisipatif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. pada pendekatan ini petugas tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, *petugas* lebih bersifat manggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Peran petugas disini berubah menjadi katalisator, pemercepat perubahan yang membantu mempercepat perubahan terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, petugas berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan arah llangkahnya sendiri (*self-determination*) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (*self help*) (Batten dalam Adi, 2003: 231). Tujuan dari pendekatan non direktif dalam upaya pengembangan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya (masyarakat tersebut)

melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka. pendekatan non direktif ini sering juga dianggap sebagai pendekatan yang bersifat partisipatif

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pemberdayaan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak yang memberdayakan atau lebih sering disebut sebagai agen perubahan (*change agent*) atau *community worker* atau tenaga pendamping dan pihak yang diberdayakan. Dalam melakukan pemberdayaan, pihak pemberdaya perlu memilah-milah strategi pemberdayaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi target perubahan.

D. Strategi Pemberdayaan

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat (Hikmat, 2001). Untuk mengembangkan masyarakat yang berdaya Ite menyarankan tiga strategi dasar pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dilakukan dengan merubah struktur dan lembaga-lembaga yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan, serta munculnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menekankan kepada oentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan keberdayaan yang lebih efektif, dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk melakukan aksi-aksi langsung
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran, menekankan pada pentingnya proses pendidikan, sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan. Cara ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendala baik structural maupun kendala-kendala kemasyarakatan, juga memberikan keyterampilan untuk berkarya secara efektif untuk menuju perubahan.

Menciptakan masyarakat yang mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan diperlukan strategi pemberdayaan melalui pengembangan kreativitas, inovasi dan pendayagunaan modal intelektual sebagai kekayaan bagi organisasi guna menghadapi masa depan. Kreativitas merupakan pengembangan ide baru dan inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara aktual dalam praktek. Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam proses pemberdayaan adalah mempengaruhi masyarakat untuk menerima ide baru kemudian berhasil mengimplementasikan ide tersebut. Untuk itu diperlukan strategi-strategi pendekatan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Beratha (1982), yaitu:

1. Strategi *persuasive*, dimana yang terpenting adalah mengadakan perubahan sikap seseorang atau segolongan orang
2. Strategi *compulsion*, membuat situasi sedemikian rupa sehingga orang terpaksa secara tidak langsung mengubah sikapnya
3. Strategi *pervasion*, mengulang apa yang diharapkan akan masuk dalam bidang bawah sadar seseorang sehingga mengubah diri sesuai dengan apa yang diulangi
4. Strategi *coersion*, memaksa secara langsung pengadaan perubahan sikap dengan adanya hukum fisik ataupun materi

Sedangkan menurut Rappaport, 1985 dalam Hikmat (2001), praktek dan kegiatan yang berbasis pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian meng-komunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri sendiri (*inner space*), orang-orang-orang lain yang dapat dianggap penting, serta masyarakat disekitar. Elaborasi dari pemikiran tersebut secara keseluruhan akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan.

Selanjutnya untuk mencapai perubahan dalam masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, dapat dilakukan dengan metode (Beratha, 1982):

1. Memberikan pengetahuan (informasi) baru
2. Mengadakan diskusi-diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, mengenai pengetahuan, masalah-masalah dan kejadian-kejadian baru
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil
4. Menciptakan wadah baru

Menurut Hikmat (2001), dalam strategi pemberdayaan harus dilakukan dengan pendekatan kerja bersama sebagai mitra kolaboratif dan kerjasama kolaboratif merupakan aktualisasi pemberdayaan. Menurut Dubois dan Miley, 1996 dalam Hikmat (2001) pemecahan masalah melalui pemberdayaan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Dialog
 - a) Persiapan kerjasama
 - b) Pembentukan kemitraan
 - c) Artikulasi tantangan
 - d) Identifikasi sumber kekuasaan
 - e) Penentuan arah
2. Penemuan
 - a) Pemahaman sistem sumber
 - b) Analisis kapasitas sumber
 - c) Menyusun frame pemecahan masalah
3. Pengembangan
 - a) Mengaktifkan sumber
 - b) Memperluas kesempatan
 - c) Mengakui temuan-temuan
 - d) Mengintegrasikan kemajuan

Strategi di atas, sejak awal proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsip bekerja bersama masyarakat dilandasi oleh prinsip bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai.

Berbagai strategi pemberdayaan sebenarnya telah banyak dicoba untuk diterapkan pada program-program pembangun, namun cenderung mengalami kegagalan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan *self sustain capability* masyarakat. Untuk itu strategi pemberdayaan yang dilakukan hendaknya memberi tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber-sumber daya pribadi, langsung (melebihi partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Kartasmita, 1996: 145). Selain itu, agar masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan dan tuntutan kepada pemerintah, dalam pelaksanaan program pembangunan hendaknya diterapkan strategi bottom up.

Agar pemberdayaan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang memuaskan diperlukan komitmen yang tinggi, baik dari pihak yang memberdayakan maupun pihak yang diberdayakan. Dari pihak pemberdaya harus melakukan pendekatan dengan memandang bahwa masyarakat bukan merupakan obyek dari berbagai program pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri (Kartasmita, 1996).

Selanjutnya Kartasmita (1996) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus melalui tiga jurusan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encorage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya.

Pendekatan yang perlu ditempuh dalam pemberdayaan, diketengahkan oleh Kindervatter (1979) adalah :

1. Need oriented, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan individu
2. Endogenous, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kondisi dan kenyataan yang berlangsung di masyarakat setempat
3. Self reliance, yaitu pendekatan dengan berorientasi pada terciptanya rasa mampu diri, percaya pada diri sendiri dan mandiri
4. Ecological sound, yaitu suatu pendekatan yang tidak melupakan aspek lingkungan.

Dilihat dari pendekatan berdasarkan besar kecilnya target sasaran pemberdayaan Edi Suharto (1977) menggolongkan pendekatan pemberdayaan pada tiga [pendekatan yaitu :

1. Pendekatan mikro, pemberdayaan dilakukan kepada sasaran secara individual melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih mereka dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.
2. Pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kelompok digunakan sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap mereka agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.
3. Pendekatan makro, atau strategi system besar (large-system strategy), cara ini diarahkan untuk mengadakan perubahan pada system lingkungan yang lebih besar/luas. Seperti ; perumusan kebijakan, perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Cara ini memandang mereka sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri untuk memilih serta menentukan cara yang tepat untuk bertindak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya banyak strategi-strategi pemberdayaan yang dirumuskan oleh para ahli. Pada intinya semua strategi pemberdayaan menekankan akan pentingnya komitmen dari pihak pemberdaya untuk mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka dan memandang pihak yang diberdayakan bukanlah sebagai obyek. Dengan demikian pihak yang diberdayakan harus ditempatkan pada posisi sentral, sehingga dapat menumbuhkan kekuatan dan kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri. Atau dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (Kartasasmita. 1996:160)

E. Pemberdayaan Masyarakat dalam PAUD

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, dan atau latihan bagi penunaian peranannya di masa yang akan datang (UUSPN, tahun 2003). Peranan peserta didik dalam masyarakat, baik secara

individual maupun sebagai anggota asyarakat merupakan keluaran (output) dari system dan fungsi pendidikan. Pada hakekatnya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia baik secara individu maupun sosial, atau dengan kata lain pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat dalam menyiapkan, menghadapi danantisipasi masa depan yang lebih memiliki harapan. Oleh sebab itu tidaklah berlebih-lebihan apabila berasumsi bahwa untuk masa depan yang memiliki harapan hendaknya disiapkan sejak dini, sejak masa prenatal, post-natal, masa kanak-kanak melalui layanan PAUD.

Memperhatikan beberapa pengertian dan hakekat pemberdayaan (seperti diuraikan pada bagian di atas), pada prinsipnya proses pemberdayaan di dalam bidang pendidikan (termasuk PAUD) tidak bisa melalui pendekatan yang partial akan tetapi memerlukan pendekatan secara holistic yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia (termasuk didalamnya pendidik, peserta didik, orang tua/wali, masyarakat lingkungan pendidikan, sponsor/pemerintas, dan pengguna lulusan), system pembelajaran, manajemen kelembagaan pendidikan dengan segala sarana dan rasaran pendukungnya, sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan itu semua dimaksudkan dalam upaya pemberdayaan di dalam proses mengembangkan potensi (daya) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan, sesuai dengan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat (life long education), oleh sebab itu kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, institusi, dan organisasi bagi anggota masyarakat yang melakukan aktivitas-aktivitas yang syarat dngan proses pembelajaran. Artinya terjadi proses interaksi educatif yang menurut Maslow (1984) di sebut proses "dialog" yang mendorong masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar/fisik sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri.

Berikut ini mari kita diskusikan bersama mengenai upaya memberdayakan masyarakat dan merespon strategi dasar kebijakan Pendidikan Nasional, sebagai berikut :

1. Pemerataan Pendidikan

Strategi pemerataan pendidikan memiliki tiga arti penting yaitu, peertama, persamaan kesempatan (equality of opportunity), kedua, aksesibilitas, dan ketiga, keadilan atau kewajaran (equity). Akan tetapi dalam realitanya walaupun peluang kearah itu ada bahkan terbuka luas namun dengan berbagai sebab atau alasan baik sosio-geografis, sosio-ekonomi, sosisl budaya dan aspek psikologis masyarakat tertentu bahkan bagian terbanyak masih tetap belum berdaya.

Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang perbedaan etnik, jenis kelamin dan asal-usul lainnya mempunyai akses yang sama untuk memanfaatkan peluang pendidikan. Untuk menunjang ekualitas dan aksesibilitas, maka harus ada ekuitas yang lebih merujuk pada dimensi vrtikal dari pendidikan. Sedangkan keadilan mengandung implikasi adanya perbedaan perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Hal ini mngandung pengertian bahwa adil dan wajar (secara etik-moral) jika peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat, dan minatnya.

Implementasi strategi pemerataan pendidikan terlihat dari kebijakan pemerintah sejak tahun 1984 mencanangkan wajib belajar 6 – 7 tahun dan pada tahun 1994 pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun (Baca Undang Undang Sitem Pendidikan Nasional No 2 tqhun 1989), sehingga wajib belajar menjadi 9 tahun (SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun) dengan tanpa membedakan ingkat status sosial ekonomi dan perbedaan lainnya. Kebijakan ini dtempuh karena disadari bahwa pendidikan dasar ini mengandung muatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kemampuan dasar tentang membaca, menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, dan mendorong motivasi peserta didik untuk belajar lanjut.

Akhir-akhir ini kebijakan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak usia 0 - 6 tahun dengan memberikan layanan bermain sambil belajar, peningkatan pola pengangsuhan anak, serta memfungsikan kembali Posyandu yang dibingkai dalam Proram Pendidikan Anak Usia dini (PAUD). Konsekuensinya maka penyelenggaraan program ini tidak sepenuhnya tngng jawab pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Tanggungjawab pemerintah kecuali merumuskan kebijakan, menyediakan program intervensi lainnya seperti intervensi financial, teknologi, tenaga ahli dan regulasi lainnya. Lebih daripada itu pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan dirinya terutama organisasi dan birokrasinya. Masyarakat dan keluarga harus siap memberikan tanggungjawab mulai dari membangun persepsi dan sikapnya terhadap pentingnya PAUD untuk masa depan anaknya, juga peranserta aktif dan membangun kekuatan kolektif masyarakat dalam memnuhi kebutuhan dan peningkatan mutu program tersebut. Strategi pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan kepada : (a) peningkatan aksesibilitas dan daya tampung, (b) menambah dan memperbaiki ruang bermain dan belajar, (c) pengadaan Tutor, (d) meringankan biaya pendidikan

2. Peningkatan kualitas

Kualitas pendidikan mengacu kepada kualitas proses dan produk, dilihat dari dimensi proses pendidikan itu berkualitas apabila proses pembelajaran itu berlangsung secara efektif artinya peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Sedangkan dari dimensi produk dikatakan berkualitas apabila peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task), hasil belajar sesuai dengan pertumbuhan dan tugas perkembangannya serta hasil belajar itu memiliki relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya. Strategi pemberdayaan yang sebaiknya dilakukan anatara lain, seperti ; (a) menyempurnaan dan pembaharuan kurikulum, (b) Peningkatan mutu tutor dan pengelola, (c) menata ulang system pembelajaran, (d) meningkatkan manajemen kelembagaan, (e) meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan tutor, (f) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, (g) menata-ulang system monitoring dan evaluasi.

3. Peningkatan Relevansi

Pendidikan dikatakan relepan jika pendidikan itu mapu memenuhi kebutuhan (needs), sedangkan kebutuhan itu sendiri sangat beragam dan senantiasa berubah seiring perkembangan dan pertumbuhan masyarakat (pembangunan). Mengacu pada undang Undang Siste Pendidikan Nasional kebutuhan itu meliputi kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga dan kebutuhan pembangunan, kebutuhan trsebut tidak selamanya sejalan satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan kebutuhan. Perbedaan itu seringkali membuat struktur, isi, dan bentuk kurikulum begitu padat dan luas kerana berkeinginan mengakomodir kebutuhan tadi. Menyikapi hal tersaebut strategi pemberdayaan lebih diarahkan kepada pengembangan sikap autonomi dalam pengambilan keputusan prioritas kebutuhan pendidikan yang antisipatif pada kurun waktu tertentu sebagai dasar pengembangan dan pembaharuan kurikulum.

4. Peningkatan Efisiensi

Pandangan klasik efisiensi dilihat dari selisih besaran hasil dengan kecilnya kurbanan yang dikeluarkan, akan tetapi pandangan kontemporer efisiensi pendidikan bukan hanya dilihat dari aspek selisih besran kurbanan dan produk saja, akan tetapi lebih luas daripada itu, efisiensi berkaitan dengan profesionalisme dalam memanej pedidikan yang mencakup aspek disiplin, keahlian, etos kerja, dan tanggung jawab. Upaya peningkatan efisiensi antara lain

perlu diberdayakan melalui reorganisasi dan desentralisasi sehingga sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara maksimal

F. Kesimpulan

Pemberdayaan (empowerment) muncul sebagai tema penting sebagai respon keprihatinan terhadap kelompok masyarakat yang terdeskriminasikan dan kebijakan program pembangunan. Strategi-strategi pemberdayaan yang mengarah kepada tujuan tersebut di atas dapat dilakukan melalui: (1) kebijakan dan perencanaan, yaitu dengan cara mengubah struktur dan kelembagaan yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan munculnya partisipasi dalam kehidupan di masyarakat. (2) aksi sosial dan politik, cara ini lebih menekankan kepada pentingnya perjuangan dan perubahan politik sehingga masyarakat bisa terlibat langsung dalam aksi sosial di masyarakat. Dan (3) melalui pendidikan serta penyadaran artinya menekankan kepada pentingnya proses pendidikan sehingga kelompok sasaran memperoleh kemampuan-kemampuan.

Pemberdayaan masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lebih difokuskan kepada implementasi kebijakan strategi dasar pendidikan nasional, yaitu pertama, strategi yang mengarah kepada pemerataan pendidikan. Strategi ini biasa dilakukan melalui cara dan pendekatan untuk : (a) menyempurnakan dan pembaharuan kurikulum, (b) Peningkatan mutu tutor dan pengelola, (c) menata ulang system pembelajaran, (d) meningkatkan manajemen kelembagaan, (e) meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan tutor, (f) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, (g) menata-ulang system monitoring dan evaluasi.

G. Daftar Pustaka

Adi, Isbandi Rukmito, (2002), *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.

_____, (2001), *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi komunitas (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.

Djalal Fasli, (2001), *Pendidikan Anak Usia Dini*, (makalah), Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Ife, Jim, (1998), *Community Development*, New York, Macmillan Publishing Company.

Rubin Herbert J., & Irene S Rubin, *Community Organizing and Development*, New York: Macmillan Publishing Company.

¹ **Penulis adalah Dosen Jurusan PLS FIP UPI**